

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan dan kedamaian di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan upaya pembangunan ekonomi. Pemerintah menjalankan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah mengarahkan pembangunan pada daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan. Efektivitas dalam mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi faktor kunci dalam memilih strategi dan instrumen pembangunan. Dengan demikian, pemilihan sektor pembangunan nasional yang menjadi fokus utama harus mempertimbangkan kriteria tersebut. Simatupang (2003) menyatakan bahwa efektivitas dalam mengurangi jumlah penduduk miskin merupakan faktor penting dalam pembangunan.

Fenomena sosial yang tak terelakkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kemiskinan. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menghadapi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan melibatkan berbagai dimensi. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat, dan diimplementasikan secara terpadu (Nasir, dkk 2008).

Selama periode 2008-2015, tingkat kemiskinan di Indonesia secara nasional terus menurun. Penurunan tersebut dapat dikaitkan dengan upaya gigih yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui berbagai program yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, yang pada gilirannya memberikan dampak positif pada peningkatan kemampuan masyarakat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kenaikan yang terus-menerus dalam harga-harga tersebut dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya akan berdampak negatif bagi penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan. Mereka berisiko berpindah status menjadi penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan masalah yang pernah bahkan sampai sekarang masih dialami di seluruh negara di belahan bumi manapun. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari lingkup daerah, regional, nasional, dan internasional. Tak terkecuali Indonesia, berbagai kebijakan pemerintah pada kemiskinan belum mampu menghapus kemiskinan. (Dita Wahyu, 2015).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator kinerja perekonomian suatu wilayah. Namun, penting untuk dicatat bahwa tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, tidak bisa diabaikan bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Menurut Siregar dan

Wahyuniari (2008), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah nasional saja, tetapi juga merambah ke setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang penduduk miksinya masih cukup tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota DIY menjadi penting untuk dipahami karena masalah kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia, termasuk di wilayah DIY. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi ini memiliki keunikan tersendiri karena merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih mempertahankan sistem kerajaan. Yogyakarta juga terkenal sebagai Kota pelajar dan pusat kebudayaan, dengan adanya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Universitas Gadjah Mada (UGM) dan berbagai institusi pendidikan lainnya.

Namun, di balik keunikan dan kekayaan budayanya, Provinsi DIY juga menghadapi tantangan dalam mengatasi jumlah penduduk miskin yang signifikan. Jumlah penduduk miskin yang tinggi dapat menjadi indikator adanya kesenjangan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi ini. Oleh karena itu,

diperlukan analisis untuk memahami pengaruh beberapa faktor terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY.

**Tabel 1.** Jumlah Kematian di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bentuk Persen

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta	D.I Yogyakarta
2011	23,62	17,28	23,03	10,61	9,62	16,14
2012	23,32	16,97	22,72	10,44	9,38	15,88
2013	21,39	16,48	21,70	9,68	8,82	15,03
2014	20,64	15,89	20,83	9,50	8,67	14,55
2015	21,40	16,33	21,73	9,46	8,75	14,91
2016	20,30	14,55	19,34	8,21	7,70	13,34
2017	20,03	14,07	18,65	8,13	7,64	13,02
2018	18,30	13,43	17,12	7,65	6,98	12,13
2019	17,39	12,92	16,61	7,41	6,84	11,70
2020	18,01	13,50	17,07	8,12	7,27	12,28
2021	18,38	14,04	17,69	8,64	7,64	12,80

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) ( 2023)

Pertama-tama, pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana pertumbuhan ekonomi berdampak pada pengurangan kemiskinan di Provinsi DIY.

Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode

tertentu. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, diharapkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY belum maksimal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009), ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjadi syarat yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan (Siregar, 2008).

Selain pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator yang sangat terkait dengan penduduk miskin, upah minimum juga menjadi salah satu indikator penyebab penduduk miskin meningkat. Menurut Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2005 (per-17/Men/VIII/2005), Konsumsi Hidup Layak (KHL) merupakan standar kebutuhan yang harus terpenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang agar dapat menjalani kehidupan yang layak secara fisik, non-fisik, dan sosial selama satu bulan. Standar ini menentukan bahwa seorang pekerja dianggap hidup layak jika pendapatan

yang diterimanya dapat memenuhi kebutuhan harian sebanyak 3000 kalori. KHL menjadi pertimbangan penting dalam penetapan upah minimum. Terdapat tujuh komponen KHL yang selalu dihitung, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan.

Selain itu, upah minimum juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Upah Minimum merupakan besaran upah yang diatur oleh pemerintah sebagai upah terendah yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Jika upah minimum yang ditetapkan cukup tinggi, maka akan memberikan perlindungan bagi pekerja dan dapat membantu mengurangi kemiskinan. Namun, jika upah minimum terlalu rendah, pekerja mungkin masih berada dalam kondisi kemiskinan meskipun bekerja.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis ini. IPM mengukur tingkat perkembangan dan kesejahteraan suatu daerah berdasarkan indikator-indikator seperti harapan hidup, pendidikan, dan penghasilan per kapita. Dengan menganalisis pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY, kita dapat memahamisejauh mna tingkat pembangunan manusia berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Terakhir, tingkat pengangguran juga merupakan faktor yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja masih cukup besar, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, analisis

pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY penting untuk memahami hubungan antara ketersediaan lapangan kerja dan tingkat kemiskinan.

Seringkali masalah Kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. Kedua masalah ini erat kaitanya dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Jika disederhanakan dalam contoh yaitu, apabila seseorang miskin maka tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan memiliki tingkat penting yang sama. Ketika masyarakat tidak mengalami pengangguran dan memiliki penghasilan, mereka dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan kebutuhan hidup terpenuhi, tingkat kemiskinan dapat ditekan, dan pada gilirannya, tingkat pengangguran akan menurun (tingkat kesempatan kerja meningkat). Ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat nyata dan relevan. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru dalam aspek ekonomi maupun non-ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan pendapatan yang rendah, yang pada akhirnya memicu kemiskinan. Menurut Sumarsono (2009): “Tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja maupun *labour force* terdiri dari (1) golongan

yang bekerja, (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan” (Yarlina Yaob,2012).

Angka pengangguran merupakan persentase dari jumlah individu yang tidak memiliki pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Orang yang sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan disebut sebagai penganggur (Sumarsono, 2009).

Dengan melakukan analisis terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan di Provinsi DIY.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY?



4. Bagaimana pengaruh Tingkat pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY.
4. Untuk menentukan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar S1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bagi pengambil kebijakan, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pendidikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Yogyakarta.

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.